

**IMPLEMENTASI KERJASAMA UNICEF DAN INDONESIA DALAM STRATEGI NASIONAL PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (STRANAS ATS) (STUDI KASUS: NAGARI TARUANG-TARUANG TAHUN 2020-2021)**

**Oleh: Atikha Sari**

Email: [atikha.sari0023@student.unri.ac.id](mailto:atikha.sari0023@student.unri.ac.id)

**Pembimbing: Indra Pahlawan, S.IP., M.Si**

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru  
28294, Telp/Fax 90761) 632277

**ABSTRACT**

*This study analyzes the implementation of cooperation between UNICEF and Indonesia in the National Strategy for Handling Out of School Children (STRANAS ATS). The case study taken is the Implementation of Stranas ATS by Nagari Taruang-Taruang as a pilot project for a Community-Based Development Information System (SIPBM). Based on SUSENAS data for 2019 there are 4.3 million school-age children who are not in school. In Nagari Taruang-Taruang there are children who are out of school with various categories and causes, where the main causes are economic factors and a lack of public awareness of the importance of education, so that Nagari Taruang-Taruang receives attention from the government for the education problems that occur.*

*This study uses qualitative methods with primary data collection techniques by conducting interviews. The perspective used is constructivism and uses the Theory of Public Policy and International Cooperation. The level analysis used is the group level.*

*The results of this study indicate that Nagari Taruang-Taruang carried out various stages and programs in implementing the ATS National Strategy. Nagari Taruang-Taruang helps non-school children to resume their education. In addition, Nagari Taruang-Taruang also seeks to restore motivation to study and school for children at risk of dropping out (ABPS) by carrying out the Back-to-School Movement. Nagari Taurang-Taruang also won an award as an Education Care Village from UNICEF and the Ministry of Village PDPT in efforts to handle ATS and ABPS.*

**Keywords: Program Implementation, Stranas Ats, UNICEF, SIPBM**

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap orang dan melihat perannya yang cukup penting dalam pembangunan dalam mencapai kesejahteraan, memotivasi negara-negara untuk memasukkan pendidikan ke dalam kerangka agenda pembangunan global, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam poin keempat. Tujuan ke empat tersebut adalah Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Mearata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua.<sup>1</sup> Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah jalan keluar untuk mewujudkan tercapainya pembangunan global yang mengedepankan.

keseimbangan antara lingkungan, sosial, ekonomi dan tatanan kehidupan lainnya. Pada tahun 2015 di New York, Amerika Serikat. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mencanangkan agenda pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Agenda SDGs ini berisikan 17 tujuan, 169 sasaran dan dijalankan pada tahun 2016 hingga 2030. Tujuan SDGs tersebut menjadi penting bagi kesejahteraan suatu negara dikarenakan tujuan tersebut akan menciptakan pembangunan yang stabil dan berkelanjutan di berbagai bidang

seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diwajibkan untuk mencapai semua tujuan di SDGs.

Melalui Nawacita yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, Wajib Belajar 12 Tahun ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan pendidikan. Sasaran wajib belajar 12 tahun ini mencakup seluruh warga negara Indonesia yang berusia 6-12 tahun agar dapat mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Pemerintah yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan anak Indonesia kesempatan memperoleh pendidikan.

*United Nations Children's Fund* (UNICEF) melakukan sebuah studi mengenai Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Beberapa faktor tersebut adalah keterpencilan daerah tempat tinggal, ketertinggalan atau kesenjangan pembangunan daerah, kemiskinan dan latar belakang ekonomi keluarga, serta masih belum memadainya layanan pendidikan untuk anak rentan seperti anak penyandang disabilitas.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-4/> Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin 4, diakses pada tanggal 20 Juli 2022

<sup>2</sup> <https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/Situation-of-Out-of->

Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) merupakan sebuah strategi yang dihasilkan dari kerjasama antara UNICEF dengan Pemerintah Indonesia. Stranas ATS ini memiliki tujuan untuk memastikan adanya penguatan, perbaikan, perluasan, serta koordinasi yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan anak-anak Indonesia. Pada akhirnya Stranas ATS ini diharapkan dapat membantu memastikan agar setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kehidupan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonoi Nasional (SUSENAS) tahun 2019, jumlah ATS usia 7-18 tahun mencapai 4,34 juta anak. UNICEF bersama Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas meluncurkan strategi nasional penangan Anak Tidak Sekolah (ATS). Pada 2019 dunia mengalami pandemi global, peluncuran STRANAS ATS pada 2020 tersebut juga disertai dengan Diseminasi Nasional Hasil Monitoring ATS dan Anak Beresiko Putus Sekolah akibat Dampak Covid-19. Salah satu desa yang ikut dalam Diseminasi Nasional tersebut adalah Nagari Taruang-Taruang yang berada di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

---

[School-Children-OOSCI-Feb-2015\\_223.pdf](#)  
UNICEF, *Global Iitiative on Out of School Children: Indonesia Case Study*, 2015 diakses pada 20 Juli 2022

## **KERANGKA TEORI**

### **Tingkat Analisa: Kelompok**

Menurut Mohtar Mas'ood ada lima kategori yang penting untuk diketahui dalam menentukan tingkat analisis dalam sebuah studi hubungan internasional, yakni perilaku individu, perilaku kelompok, negara-bangsa, kelompok negara-bangsa dan sistem internasional.<sup>3</sup> Pada penelitian ini tingkat analisa yang digunakan oleh penulis adalah tingkat analisis kelompok. Dimana yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah mempelajari perilaku kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam hhubungan internasional. Ilmuwan menekankan bahwa tingkat analisa perilaku kelompok berasumsi sebuah individu pada umumnya melakukan suatu tindakan internasional dalam suatu kelompok. Sehingga, fenomena hubungan internasional lebih dilihat sebagai hubungan antar berbagai kelompok individu di berbagai negara. Untuk memahami hubungan internasional diperlukan pengkajian mengenai perilaku kelompok-kelompok individu dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional, seperti kabinet dalam pemerintahan, dewan penasehat keamanan, organisasi birokrasi, departemen atau badan-badan pemerintahan, dan sebagainya.

---

<sup>3</sup> Mohtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internaaional : Displin dan Metodologi*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES. Hlm 46

## **Teori *Public Policy* (Kebijakan Publik)**

Dalam buku yang berjudul “Kebijakan Publik Teori dan Proses” karya Prof. Budi Winarno Kebijakan Publik didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis proses pembuatan kebijakan public serta dampaknya pada masyarakat. Teori ini mencakup beberapa elemen penting, yang meliputi:<sup>4</sup>

1. Aktor
2. Proses
3. Tujuan
4. Evaluasi

## **Teori Kerjasama Internasional**

Zartman & Touval mengajukan bahwa kerja sama internasional dapat terjadi melalui proses negosiasi yang melibatkan negara dan organisasi internasional. Negosiasi ini dapat mencakup pembagian tugas, alokasi sumber daya, dan pemecahan masalah bersama.<sup>5</sup> Teori ini juga menekankan pentingnya kepercayaan antara negara dan organisasi internasional dalam mencapai kerja sama yang efektif. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, serta pengakuan atas kepentingan masing-masing pihak.

Kerjasama antara negara dengan non-negara, dalam hal ini institusi atau organisasi internasional, mulai bermunculan karena baik negara

maupun organisasi sama-sama saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama, dan dengan adanya institusi atau organisasi maka dapat mengurangi biaya dan menyediakan informasi dalam kerjasama.<sup>6</sup> Kemudian Keberhasilan kerjasama menyangkut masalah kesamaan (*mutualitas*) kepentingan, jumlah aktor yang terlibat, serta bayangan masa depan (*shadow of the future*).

## **Perspektif: Konstruktivisme**

Organisasi Internasional dapat memainkan peran penting dalam penyebaran *belief* dan standar perilaku. Subjektivitas dari aktor konstruktivisme dalam negara juga berpegaruh erat dalam mempengaruhi jalan pikir untuk membuat, merencanakan maupun memutuskan suatu hal terkait dengan kebijakan ataupun hal lainnya. Subjektivitas tersebut mencakup nilai-nilai fundamental, ideologi yang dianut, norma yang dipakai hingga agama yang dianut.<sup>7</sup>

Pendekatan berbasis pengetahuan tidak puas atas penjelasan ekonomi para rasionalist, sejatinya yang menentukan perilaku aktor adalah, lebih kepada pengetahuan. Konstruktivis menganggap bahwa organisasi internasional memaikan

---

<sup>4</sup> Budi winarno. 2012. Kebijakan Publik: Teori,Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta. CAPS

<sup>5</sup> Zartman, I., & Touval, S. (2010). *International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism*. New York: Cambridge University Press.

---

<sup>6</sup> Keohane, Robert O & Robert Axelrod (1985) “*Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions*”. *World Politics*. 38 (1) : 226-254

<sup>7</sup> Martha Finnemore. 1993. *International Organizations as Teachers of Norms: the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization and Science Policy*. *International Organization*, 47(4), hal. 565-597.

peran yang vital dan independen dalam menyebarkan norma-norma global. Konstruktivis juga percaya bahwa diskursus normative adalah aspek penting dalam kehidupan, institusi, di mana norma diperdebatkan, dibentuk dan disebar oleh institusi internasional.<sup>8</sup>

Pendekatan konstruktivis pada organisasi internasional berbicara mengenai hubungan antara negara dan organisasi internasional dibentuk oleh proses interaksi diantara keduanya. Negara bereaksi atas keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh organisasi internasional, negara bisa memperkuat *power* dan otoritas organisasi internasional.<sup>9</sup> Salah satu bentuknya adalah penghormatan negara-negara atas resolusi PBB, dukungan atas operasi perdamaian hingga pelaksanaan MDGs dan SDGs.

## PEMBAHASAN

Dibentuk pada 1946, UNICEF berdiri dengan tujuan awal untuk memberikan bantuan kepada anak-anak di negara yang hancur akibat Perang Dunia II. Pasca 1950, organisasi ini kemudian diarahkan kepada upaya program-program umum guna meningkatkan kesejahteraan anak, khususnya di negara-negara berkembang dan yang sedang dalam keadaan darurat. Memiliki mandate yang besar terhadap anak, hingga saat ini UNICEF hadir untuk membantu upaya nasional dalam menyediakan

kesempatan bagi anak-anak dan remaja yang kurang beruntung untuk memaksimalkan potensi dan meningkatkan kesehatan, gizi, kualitas Pendidikan, kesetaraan, dan kesejahteraannya.

Aktif di lebih dari 190 negara, UNICEF menggunakan otoritas globalnya untuk memastikan anak-anak di dunia mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya dan dapat berkembang di lingkungan yang bebas dari kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi.<sup>10</sup> UNICEF berkerja untuk *Millenium Development Goals* hingga *Sustainable Development Goals* serta kemajuan yang dijanjikan dalam piagam PBB untuk keadilan dan kesejahteraan anak. UNICEF percaya bahwa untuk membentuk fondasi utama dari perkembangan manusia salah satunya dengan merawat dan mempromosikan hak-hak anak di dunia. Organisasi dibawah naungan PBB ini banyak berkontribusi pada dukungan dan penyediaan dana untuk layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perlindungan hak anak dengan pendanaan yang berasal dari pemerintah dan swasta.

UNICEF meyakini bahwa pemenuhan hak anak dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk melahirkan semangat dan optimism baru dari generasi muda yang dapat memicu tranformasi social dan ekonomi. Untuk mewujudkan peluang-peluang tersebut UNICEF bekerja sama dengan pemerintah negara, badan-badan PBB, sector

---

<sup>8</sup> Karemenos, B., Lipson, C., Snidal, D. 2001, "The rational design of international institutions", *International Organization*, 55(4), hal. 761-799.

<sup>9</sup> Ian Hurd. 2002. Legitimacy, Power and the Symbolic Life of the UN Security Council. *Global Governance*. 8, hal. 35-51.

---

<sup>10</sup> UNAIDS. (2015). [https://www.unaids.org/sites/default/files/media\\_asset/UNICEF\\_en.pdf](https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNICEF_en.pdf) diakses pada tanggal 13 Desember 2022

swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan individu muda sebagai jaringan mitranya.

Bekerjasama dengan Institusi Statistik UNESCO pada tahun 2012, UNICEF meluncurkan *Out-of-School Children Initiative* (OOSCI) atau Inisiatif Anak yang Tidak Bersekolah secara global yang bertujuan untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah di seluruh dunia secara substansial dan berkelanjutan dengan memberikan data yang dapat ditindaklanjuti kepada pemerintah negara mitranya.

### **Kerjasama UNICEF dan Indonesia dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia**

Untuk menanggapi permasalahan Pendidikan dasar di Indonesia, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan kualitas dan akses ke Pendidikan bagi anak-anak berusia 3-18 tahun, khususnya bagi anak-anak dengan disabilitas dan yang berada di wilayah terpinggirkan dengan mengacu pada rancangan aksi prioritas masing-masing wilayah. Prioritas utama Indonesia untuk mengurangi jumlah anak tidak sekolah membuat dukungan UNICEF mengarah pada pembuatan bukti berupa penyediaan data, advokasi kebijakan, dan penguatan system untuk akses pendidikan yang adil, peningkatan hasil pembelajaran, dan pengembangan keterampilan remaja.

Sejak 2010, UNICEF fokus dalam meneliti dan mengkaji hal-hal yang dianggap menjadi hambatan bagi anak memperoleh akses pendidikan dasar untuk semua di Indonesia

terangkum dalam beberapa kerja sama yang dilakukan keduanya, antara lain:

### **Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM)**

Dalam konteks mencapai pendidikan dasar untuk semua di Indonesia, UNICEF mengusung penguatan data terkait dengan Anak Tidak Sekolah (ATS). Sejak dirilis 2002, UNICEF telah bekerja sama dengan pusat data dan statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat. SIPBM adalah program pengumpulan data dengan responden kepala keluarga yang dilakukan secara sensus oleh anggota masyarakat sekitar dengan tujuan untuk mengetahui jumlah ATS dan mengetahui domisili dari anak tersebut untuk kemudian ditentukan program yang akan membantu membawa anak kembali ke sekolah.

### **Perencanaan Pendidikan Berbasis Data**

Untuk memastikan agar anak tidak sekolah dapat kembali bersekolah, UNICEF mendorong pengalokasian sumber daya pemerintah dengan mengembangkan apa yang disebut dengan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data. Sebelumnya UNICEF telah mendukung pemerintah agar memiliki data yang akurat terkait dengan anak tidak sekolah, melalui program ini dilakukan penataan mengenai bagaimana data tersebut sebagai basis untuk membuat perencanaan Pendidikan dalam memnangani permasalahan anak tidak sekolah yang telah diidentifikasi dari pemetaan

berbasis masyarakat sebelumnya dengan melibatkan *stakeholder* penting sebagai esensinya.

### **Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS)**

Dengan kekuatan dan *expertise* yang dimiliki serta ditunjang dengan berbagai hasil studi dan penelitian, UNICEF berupaya bersama-sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi dan mengembangkan solusi-solusi yang inovatif yang dianggap bisa lebih efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam bekerja sama dengan Indonesia yang dimulai sejak upaya pencapaian pendidikan dasar yang berbasis MSGs, UNICEF memiliki sistem *piloting* yang tugasnya adalah mengembangkan model-model program kerja sama yang efektif dan *affordable*.

Melalui sistem *piloting*, UNICEF mencoba membantu mengatasi permasalahan nasional yang ada, tidak hanya penciptakan teori, tetapi juga membuktikan bahwa yang ditawarkan UNICEF efektif dalam menjawab permasalahan yang ada. Sistem *piloting* yang dilakukan UNICEF bertujuan untuk menyadarkan pemerintah bahwa perlu adanya sistem pemetaan yang dilakukan secara detail di level masyarakat mengenai data permasalahan anak tidak sekolah. Pemetaan yang dilakukan kemudian diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap daerah atau wilayah di Indonesia dalam mencari solusi secara aktif dan mandiri dari permasalahan yang ada.

Dalam meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak usia sekolah dasar, pemerintah Indonesia sudah memiliki banyak program Pendidikan dan pengalokasian sumber daya manusia dalam mendukung peningkatan akses terhadap pendidikan untuk anak-anak yang berada dalam kelompok rentan, seperti anak jalanan, anak pekerja, anak berkebutuhan khusus, dan anak di daerah 3T.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai tantangan yang ada di setiap program membuat penanganan anak tidak sekolah belum bisa efektif dan saling melengkapi satu sama lain secara optimal. Kehadiran Stranas ATS sebagai dokumen nasional dengan implementasi di daerah yang dilengkapi petunjuk teknis sangat membantu dalam melakukan analisa mendalam terhadap suatu program dan kebijakan yang ada. Nantinya, jika analisa tersebut menghasilkan sesuatu yang bagus dan bermanfaat, pemerintah pusat maupun daerah dapat mengintegrasikannya dengan sistem yang ada melalui penerbitan kebijakan-kebijakan yang relevan agar ketika pemerintah pusat maupun daerah ingin melaksanakan program tersebut ada dasar yang jelas.

#### **a. Prinsip-Prinsip Penanganan ATS**

Perencanaan dan implementasi strategi penanganan ATS didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Strategi penanganan ATS dikembangkan berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan pemerintah yang sudah ditetapkan dan dalam semangat memperkuat dan meningkatkan manfaat

- program yang sudah dijalankan berbagai Kementerian/Lembaga.
2. Isu ATS adalah isu yang terkait dengan dan merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta pihak terkait lainnya, yang membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
  3. Strategi penanganan ATS di daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah dan stake holder terkait sebagai respon terhadap konteks permasalahan ATS di daerahnya masing-masing. Terkait dengan hal ini, faktor penyebab anak tidak bersekolah serta hambatan yang menjadi penghalang partisipasi sekolah di setiap daerah perlu diidentifikasi secara jelas dan ditangani melalui strategi yang dirancang dan diimplementasikan sesuai kondisi lokal.
  4. Solusi dan strategi penanganan ATS berbasis kearifan lokal dapat menjadi basis replikasi, adaptasi, dan perluasan agar strategi serupa dapat diterapkan di daerah lain atau pun diangkat ke tingkat nasional.
  5. Pengembangan strategi penanganan ATS harus berbasis data dan informasi ATS yang akurat untuk menjadi rujukan dalam perencanaan dan penganggaran agar penanganan ATS sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi di masing-masing daerah.

#### **b. Pendekatan Penanganan ATS**

Tujuan umum Stranas ATS adalah untuk mengupayakan agar

seluruh anak usia sekolah (7-18 tahun) di Indonesia kembali dan terus berpartisipasi dalam pendidikan dan/atau pelatihan yang sesuai dan bermanfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Stranas ini mengedepankan strategi intervensi dan strategi pencegahan. Strategi intervensi ditujukan kepada anak-anak dan remaja yang tidak bersekolah, sedangkan strategi pencegahan diarahkan untuk memastikan agar anak yang beresiko putus sekolah tetap bersekolah sampai tuntas Pendidikan Dasar dan Menengah 12 Tahun.

##### **1) Strategi 1: Intervensi**

Strategi intervensi ditujukan kepada anak yang saat ini tidak bersekolah atau berada diluar sistem pendidikan baik formal maupun nonformal. Strategi intervensi bertujuan untuk menjangkau, mendaftarkan, mengembalikan dan mendampingi ATS ke dalam program pendidikan dan pelatihan yang relevan. Proses pendampingan ATS yang ingin kembali bersekolah, misalnya melalui program retrieval, sangat diperlukan untuk memastikan agar ATS dapat melalui proses transisinya dengan baik dan dapat beradaptasi dengan proses pembelajaran yang akan diikuti. Arah kebijakan dan aksi prioritas penanganan ATS disesuaikan dengan masing-masing kelompok ATS.

##### **2) Strategi 2: Pencegahan**

Strategi pencegahan bertujuan untuk menjaga agar peserta didik tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya, dan melanjutkan ke jenjang berikutnya sampai tuntas Wajib Belajar 12 Tahun. Tujuan

utama strategi pencegahan adalah untuk mengembangkan mekanisme pemantauan untuk mengetahui anak dan remaja yang masih berada dalam sistem pendidikan atau pelatihan namun rentan atau beresiko putus sekolah. Strategi pencegahan juga meliputi upaya-upaya tertentu yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi layanan pendidikan yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi khusus yang dihadapi oleh kelompok ATS. Strategi pencegahan ATS meliputi:<sup>11</sup>

- Pengembangan sistem deteksi dini anak rentan putus sekolah yang dilakukan manajemen sekolah dan guru dan berdasarkan data kehadiran anak dan pencapaian pembelajaran.
- Pengembangan basis komunikasi dan hubungan kolaboratif erat antar satuan pendidikan dan orang tua, termasuk untuk deteksi dini indikasi anak rentan putus sekolah.
- Melakukan analisa lebih lanjut untuk menemukan faktor-faktor atau indikator yang mampu mendeteksi kerentanan anak dalam menjadi putus sekolah.
- Pengembangan upaya intervensi dan pendampingan peserta didik yang diprediksi rentan putus sekolah melalui pendekatan yang ramah anak, partisipatif, serta melibatkan orang tua peserta didik.

- Pengembangan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan ramah anak, terutama pengembangan prosedur penanganan isu-isu atau permasalahan yang dihadapi anak sehingga menjadi rentan putus sekolah, misalnya prosedur untuk menangani masalah ketidakhadiran di sekolah, isu pencapaian pembelajaran yang belum maksimal, isu kelakuan buruk di lingkungan sekolah, serta isu kesehatan psikis dan keamanan anak di sekolah (terkait kasus kekerasan dalam sekolah atau *bullying*) dan permasalahan terkait ketidakmampuan keluarga membayar biaya sekolah.
- Integrasi pencegahan anak putus sekolah sebagai bagian dari standar penjaminan mutu sekolah dan komponen pengembangan kapasitas (*professional development*) guru.
- Pengembangan sistem pemantauan keberadaan anak usia sekolah di jam sekolah berbasis masyarakat, dan sosialisasi prosedur komunikasi dan pemberitahuan kepada orang tua dan satuan Pendidikan.

## **Implementasi Stranas ATS di Nagari Taruang-Taruang**

### **1. Pendataan ATS Melalui SIPBM**

Sejak tahun 2016, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerja sama dengan UNICEF telah mengembangkan Program Integrasi Sistem Informasi

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 38

Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Desa. SIPBM yang menjadi bagian dari Sistem Informasi Desa, mengupayakan perencanaan desa berkualitas dan inovatif dengan cara mendorong lahirnya suatu program terutama terkait pelayanan dasar di desa yang mendasarkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, yang diketahui dari data *riil by name by address* yang dikumpulkan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan metode sensus berbasis keluarga.

SIPBM merupakan suatu inisiatif pengumpulan data yang menggunakan metodologi sensus. Proses SIPBM mengutamakan partisipasi masyarakat di mana data diambil dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat serta pemerintah. Karena SIPBM dapat menyediakan data berdasarkan nama dan alamat, data SIPBM dengan demikian dapat digunakan sebagai referensi strategis oleh pemerintah di tingkat lokal (yaitu pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa) sebagai dasar mengembangkan perencanaan hingga pengambilan keputusan kebijakan pendidikan dan strategi implementasinya yang lebih akurat demi memperbaiki akses pendidikan untuk semua anak.

Pada tahun 2020 Nagari Taruang-Taruang dijadikan sebagai *pilot project* Program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dalam pendataan ATS/ABPS oleh Kementerian Desa, PDTT melalui Tim SIPBM Kabupaten Pasaman. Setelah terbentuk Tim Verifikasi Data SIPBM di Nagari Taruang-Taruang, maka dilakukan

pendataan melalui Aplikasi SIPBM terhadap 262 Kartu Keluarga (KK) dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Nagari Taruang-Taruang, dan terdapat 104 KPM yang memiliki anak usia sekolah (7-18 tahun) dan ditemukan 4 KK yang terdapat ATS/ABPS. Dari 4 KK tsb, dilakukan perhatian kepada anak-anak ATS/ABPS dengan menganggarkan di APB Nagari yaitu :

- a) Memberikan bantuan baju seragam,
- b) Melakukan kegiatan sosialisasi gerakan kembali ke sekolah (pesertanya merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang dapat mendukung pendidikan Anak ATS/ABPS agar tidak berhenti).

Kegiatan ini juga didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman salah satunya merekomendasikan Anak ATS/ ABPS Nagari Taruang-Taruang untuk mengikuti Program Paket, dari 4 orang Anak ATS/ABPS Nagari Taruang-Taruang direkomendasikan 3 anak mengikuti program paket, diantaranya Paket C IPS 1 (Satu) orang, Paket B 2 (Dua) orang, dan Program Paket ini di gratiskan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Pasaman.

## **2. Pemberian Bantuan Kepada Anak Tidak Sekolah (ATS)**

Setelah dilakukan Pendataan melalui SIPM selanjutnya Tim Teknis Penanganan ATS Nagari Taruang-Taruang merincikan dan merealisasikan bantuan yang akan diberikan kepada ATS. Pemberian bantuan ini dilakukan oleh pihak tim teknis tingkat desa/nagari, karena pada tahap implementasi UNICEF

menyerahkan semua kegiatan kepada pemerintah khususnya di daerah.

Terdapat empat anak ATS menerima bantuan sebesar Rp.1.000.000 untuk setiap ATS. Terdapat 3 Orang ATS yang mengikuti program Paket, yaitu Putri Widya Ningsih (Paket B), M. Iswandi (Paket B), dan Khorotunnisa (Paket C), dan 1 Orang yang melanjutkan Pendidikan di SMA yaitu Talita Islami.

### 3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan Stranas. Upaya yang perlu dilakukan meliputi pengembangan sistem pemantauan secara berkala dan pengumpulan informasi terkait proses pelaksanaan yang dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Pengembangan lebih lanjut sistem pemantauan pelaksanaan penanganan ATS dapat merujuk pada pemantauan yang dilakukan pada tahap uji coba pelaksanaan penanganan ATS di daerah.

Tim Teknis Lintas Sektor Stranas ATS Tingkat Nasional memiliki peran sebagai berikut:<sup>12</sup>

- Memantau kemajuan dan proses implementasi strategi penanganan ATS di daerah percontohan, dan menilai kebutuhan dukungan teknis berkelanjutan yang diperlukan
- Dokumentasi dan diseminasi pembelajaran dan praktik baik dalam implementasi stranas ATS
- Pelaporan kepada Komite Pengawas (setidaknya dua kali per tahun)

- Pemantauan strategi pendataan ATS
- Mengkoordinasi pelaksanaan studi garis awal (*baseline study*) dan hasil akhirnya setelah implementasi strategi penanganan ATS di daerah percontohan.

Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan oleh Tim Teknis/Kelompok Kerja Lintas Sektor Stranas ATS Tingkat Nasional yang wakilkan oleh Bappenas, dan Kementerian Desa PDTT, selain itu Evaluasi juga diikuti oleh Tim Penanganan ATS dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Kabupaten Pasaman, dan Dinas terkait.

Pada Implementasi Stranas ATS nagari Taruang-Taruang telah melakukan sesuai dengan prinsip ATS itu sendiri, yaitu: Adanya strategi berbasis data yang akurat, lengkap, dan terbaru terkait ATS; Strategi Intervensi yang spesifik dan tertarget; Pemetaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang lintas sektor yang jelas. Atas tercapainya prinsip-prinsip ATS, Nagari Taruang-Taruang mendapatkan apresiasi dari UNICEF dan Kementerian Desa PDTT berupa Penghargaan Sebagai Desa Peduli Pendidikan Pada 2020.

### 4. Pelaksanaan Sosialisasi Gerakan Kembali Sekolah

Upaya mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) kembali ke sekolah ini merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan Stranas ATS, yakni memastikan semua anak di desa mengenyam pendidikan baik di formal, nonformal dan informal. Gerakan ini memberikan kesempatan kedua bagi anak yang

<sup>12</sup> Bappenas, Op.Cit, hal 54

putus sekolah untuk mendapatkan masa depan yang lebih bagus.

Sosialisasi Gerakan Kembali Sekolah ini dilakukan Nagari Taruang-Taruang melalui kerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman; UPT SD, SMP, dan SMA; Badan Musyawarah (Bamus) Nagari; TP PKK Kecamatan dan Nagari; dan Tokoh masyarakat. Sosialisasi ini juga dihadiri oleh ATS dan ABPS Nagari Taruang-Taruang. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun kembali motivasi belajar dan sekolah dari ATS dan ABPS. Selain itu Sosialisasi ini juga melakukan kegiatan tanya jawab seputar kendala yang dialami oleh ATS dan ABPS guna untuk ditindak lanjuti bagaimana solusi kedepannya.

#### **5. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)**

FGD adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan diskusi terstruktur dengan topik tertentu dan dipandu seorang moderator. Pada November 2021 Nagari Taruang-Taruang melakukan FGD yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman terkait dengan kegiatan rekonfirmasi data dalam rangka monitoring lanjutan ATS dan ABPS yang sebelumnya sudah dilakukan pada tahun 2020. Kesimpulan yang didapat dari FGD adalah sebagai berikut:

1. Dari 4 (Empat) Orang anak tidak sekolah (ATS) hasil pemutakhiran data SIPBM tahun 2020, ada tambahan 1 orang ATS dan Satu orang ABPS data tahun 2021.
2. Setelah dilakukan diskusi dan tanya jawab kepada semua ATS dan ABPS dan orang tua yang hadir didapatkan hasil dua ATS

tingkat SMP/Sederajat dan 3 ATS tingkat SMA/Sederajat.

3. Pemerintah Nagari Taruang – Taruang berinovasi untuk seluruh perangkat nagari termasuk Wali Nagari, Bamus Nagari, Lembaga yang ada di Nagari dan seluruh staff nagari untuk memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) yang akan dikumpulkan dan diberikan kepada ATS setiap bulannya yang bertujuan membantu melanjutkan pendidikan.
4. Pemerintah Nagari akan melanjutkan anggaran kegiatan pembelian baju seragam dan alat – alat sekolah kepada ATS yang berminat untuk melanjutkan sekolah.
5. Bagi ATS yang belum masuk sebagai penerima BLT dana Desa akan dimasukkan Tahun Anggaran 2022 sebagai Penerima BLT Dana Desa.
6. Wali Nagari dan Bamus Nagari sepakat tetap menggarang di APB Nagari Sosialisasi Kembali Ke Sekolah untuk mendorong bagi semua pihak untuk keberlanjutan pendidikan Anak.
7. Hasil Rekonfirmasi data yang orientasi aspirasinya mengarah pada kebutuhan Program/kegiatan pembangunan berskala kabupaten perlu digarisbawahi dan disuarakan pula dalam agenda Musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten (Musrenbangka).

#### **SIMPULAN**

Sejak UNICEF benar-benar fokus dalam melakukan studi dan mengadvokasi hasil studi ke berbagai

pihak, *stakeholder*, pemerintah dan non-pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, permasalahan anak tidak sekolah dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua semakin mendapat perhatian lebih. Artinya, jika sebelumnya persoalan anak tidak sekolah hanya dianggap sebagai fenomena biasa yang sering terjadi, sejak hadirnya UNICEF dan program kerja samanya di Indonesia, persoalan ini mulai mendapat perhatian yang memadai. Kerja sama UNICEF dengan Indonesia melalui program SIPBM, PKBM, dan Stranas ATS menunjukkan bahwa isu ATS penting untuk ditangani jika pemerintah ingin mencapai tujuan empat SDGs, yakni mencapai pendidikan yang inklusif dan merata.

Proses monitoring kerja sama dilakukan dengan mengacu kepada indikator-indikator yang telah ditetapkan sejak awal yang kemudian menjadi rujukan untuk melihat apakah suatu program tersebut berhasil atau tidak.. Rancangan Aksi Daerah (RAD) yang dimiliki setiap daerah memudahkan UNICEF dalam mengevaluasi dan memonitor pencapaian target melalui indikator-indikator yang ada.

Berdasarkan Teori Kebijakan Publik oleh Budi Winarno, Implementasi Stranas ATS di Nagari Taruang-Taruang telah memenuhi empat elemen yang penting dalam kebijakan publik, diantaranya:

#### 1. Aktor

Dalam Stranas ATS aktor yang ikut terlibat dalam rangkaian perancangan hingga evaluasi meliputi Pemerintah Indonesia yang diwakili Bappenas dan

Kementerian PDPT, UNICEF, Pemerintah Nagari hingga masyarakat sipil Nagari Taruang,

#### 2. Proses

Proses Pembuatan Stranas ATS dimuali pada saat akhir penilaian pencapaian MDGs, mulai di uji cobakan dari tahun 2018-2020 dan diperluas jangkauannya dari tahun 2020 hingga pada penilaian akhir nanti di tahun 2030 beriringan dengan penilaian pencapaian SDGs. Implementasi kebijakan ini di Nagari Taruang-Taruang dimulai pada 2020-2021.

#### 3. Tujuan

Stranas ATS ini memiliki tujuan untuk memastikan adanya penguatan, perbaikan, perluasan, serta koordinasi yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan anak-anak Indonesia. Pada akhirnya Stranas ATS ini diharapkan dapat membantu memastikan agar setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kehidupan.

#### 4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan. Pada Implementasi Stranas ATS di Nagari Taruang-Taruang telah dilakukan evaluasi oleh Tim Tim Teknis/Kelompok Kerja Lintas Sektor Stranas ATS Tingkat Nasional yang wakikan oleh Bappenas, dan Kementerian Desa PDPT, selain itu Evaluasi juga diikuti oleh Tim Penanganan ATS

dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Kabupaten Pasaman, dan Dinas terkait.

Security Council. *Global Governance*". 8, hal. 35-51.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Keohane, Robert O & Robert Axelrod (1985) "*Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions*". *World Politics*. 38 (1) : 226-254

May, Rudy, T. 2009, *Administrasi dan Organisasi Internasional*,. Bandung : Angkasa.

Mohtar Mas' oed. 1990. Ilmu Hubungan Internaaional: Displin dan Metedologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Winarno, Budi, 2007, Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Yogyakarta, Media Presindo

Zartman, I., & Touval, S. (2010). *International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism*. New York: Cambridge University Press

### Artikel Jurnal

Finnemore, M. 1993. "International Organizations as Teachers of Norms: the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization and Science Policy". *International Organization*, 47(4), 565-597.

Hurd, I. 2002. "Legitimacy, Power and the Symbolic Life of the UN

Priyanka, Ellissa & Heryadi, Dudy. "Kerja Sama UNICEF dengan Indonesia dalam Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua sebagai Tujuan Dua MDGs". *Padjadjaran Journal of International Relations* (PADJIR) 02 No.1 (2020): 8-11

### Dokumen

Kementrian PPN/Bappenas Indoesia, Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia.

UNICEF, "*UNICEF Executive Board: An Informal Guide 2021*

UNICEF, *Office of the Secretary of the Executive Board, The UNICEF Executive Board: An Informal Guide 2021*.

UNICEF, "*Sixty Years for Children*" (New York: 2006)

UNICEF, "*Emerging from The Ashes of War: 1946-1979*."

### Website

UNICEF, Global Initiative on Out of School Children: Indonesia Case Study <https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2015/12/Situation-of-Out-of-School-Children->

[OOSCI-Feb-2015\\_223.pdf](#),  
2015 diakses pada 20 Juli 2022

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  
poin 4  
<https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-4/>, diakses pada tanggal 20  
Juli 2022

[https://www.undp.org/sustainable-  
development-goals](https://www.undp.org/sustainable-development-goals) diakses  
pada tanggal 7 November 2022

UNAIDS.(2015).[https://www.unaids.o  
rg/sites/default/fi  
les/media\\_asset/UNICEF\\_en.p  
df](https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNICEF_en.pdf) diakses pada tanggal 13  
Desember 2022